

ABSTRAK

Bank Jateng merupakan salah satu lembaga pembiayaan dalam bentuk Perbankan yang mau, menerima jaminan kapal nelayan, khususnya Bank Jateng Cabang Pati. Persetujuan kredit ini wajib selaras dengan ketentuan Perundangan agar sah dimata hukum. Apabila satu dari pihak tidak mencukupi kewajibannya selaras dengan persetujuan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga konsekuensinya ialah munculnya eksekusi hukum karena debitur tidak mencukupi kewajibannya seperti yang sudah dijanjikan. Penelitian yang dijalankan bertujuan guna mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi debitur dengan jaminan kapal nelayan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati. Selain itu, penelitian yang dijalankan juga bertujuan guna mengerti dan menganalisis penyelesaian wanprestasi terhadap persetujuan dengan jaminan kapal nelayan pada penyelenggaraan kredit usaha produktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati. Metode pendekatan yang dimanfaatkan ialah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer didapat dengan wawancara dengan Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati dan Pemilik Kapal di Kecamatan Juwana, sementara data sekunder berupa bahan hukum. Metode analisis yang dimanfaatkan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika eksekusi terhadap objek jaminan kapal nelayan yang timbul dari persetujuan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati wajib ditanggung sepenuhnya oleh pihak debitur. Maka sebab itu, ketika berlangsung wanprestasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur membayar cicilan kredit, pihak bank perlu mencari penyelesaian, baik dengan proses litigasi atau non-litigasi.

Kata kunci: Jaminan Kapal Nelayan, Wanprestasi, Eksekusi terhadap Jaminan Kapal